

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian suatu negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam suatu negara, tenaga kerja ada yang dipekerjakan di dalam dan di luar negara itu sendiri. Seperti halnya Indonesia, tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat menghasilkan devisa negara yang turut mendukung perekonomian Indonesia. Sehingga mereka dikenal dengan istilah pahlawan devisa negara. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berasal dari desa-desa yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 46.418 orang sementara pada tahun 2010 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 53.815 orang.²

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah yang mengirimkan buruh migran dalam jumlah yang tinggi dibandingkan kabupaten lain di provinsi Jawa Timur. Pengiriman buruh migran memberikan manfaat dengan peningkatan pendapatan keluarga atau disebut remitan yang akan dikirimkan kepada keluarga di kampung halaman. Akan tetapi, keluarga yang

² Rachmat Syafaat, *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2002), hal. 1

ditinggalkan tidak bisa mengelola remitan yang dikirimkan karena menggunakan dengan cara konsumtif. Apabila buruh migran sudah habis masa kontrak dan kembali ke kampung halaman tidak ada pendapatan yang berkelanjutan karena tidak ada modal ataupun investasi untuk usaha produktif yang dilakukan. Hal ini yang mengakibatkan banyak TKI purna kembali untuk berangkat bekerja di luar negeri. Maka dari itu para pekerja migran di BKTKI Sempulur diberikan peran yang penting dalam UMKM Di BKTKI Sempulur yaitu memberi kontribusi kepada UMKM agar dapat memberi peluang untuk warga desa atau keluarga dari pekerja migran tersebut yang ingin mengembangkan UMKM nya melalui BKTKI Sempulur, Harapan dari buruh migran dapat mandiri secara ekonomi, agar nanti ketika para pekerja migran kembali dari luar negeri mereka mempunyai usaha lewat UMKM yang di kontribusi sebelumnya untuk BKTKI Sempulur Di desa Pagersari. Dan tidak terus kembali bekerja di luar negeri dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui UMKM. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung menerapkan beberapa desa dalam penerapan program Bina Keluarga TKI ini. Salah satu desa yang dipilih yaitu Desa Pagersari dengan membentuk Kelompok Kerja BKTKI Sempulur dimana anggota kelompok terdiri dari TKI purna dan keluarga TKI.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari dampak krisis tersebut sehingga masyarakat begitu minim dalam menikmati akses sosial dan ekonomi seperti lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan akses lainnya. Hal itu yang menjadi syarat-syarat mengapa masyarakat berada dalam garis

kemiskinan, terutama masyarakat yang berada di daerah atau desa-desa.³ Tidak jarang dari beberapa kebijakan, baik kebijakan dari pemerintah Indonesia maupun kebijakan pemerintah di negara tempat bekerjanya, tidak mencerminkan keberpihakan terhadap TKI seperti kebijakan penempatan kerja, biaya penempatan kerja, waktu bekerja, dan biaya-biaya lainnya yang mencekik penghasilannya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya pengetahuan atas peraturan-peraturan yang ada karena mayoritas TKI tersebut berasal dari pedesaan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah karena mengalami keterbatasan atas beberapa akses yang berdampak pada rendahnya kesadaran TKI untuk menyelesaikan beberapa persoalannya baik secara individu maupun secara bersama-sama melalui organisasi. Bagi TKI yang mempunyai kesadaran tinggi atas keadaan yang dialaminya maka TKI akan mencoba merubah keadaan tersebut dengan beberapa cara, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi atau terlibat dalam organisasi TKI.

Saat TKI berkerja di luar negeri terdapat berbagai permasalahan yang terjadi bagi keluarga TKI yang ditinggalkan. Permasalahan yang terjadi pada keluarga TKI tidak mampu mengelola uang hasil kiriman yaitu remitan digunakan secara konsumtif, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan anak yang ditinggalkan tidak mendapatkan pengasuhan dari kedua orangtua yang utuh. Salah satu upaya pemerintah dengan kebijakan program Bina Keluarga TKI. Kebijakan Bina Keluarga TKI belum diterapkan di seluruh

³ Retno Dewi, *Membongkar Perbudakan Modern Buruh Indonesia*, Jurnal ATKI, 2010, hal. 5-6

daerah kantong TKI. Salah satu kabupaten yang menerapkan kebijakan Bina Keluarga TKI adalah Kabupaten Tulungagung dengan tiga desa percontohan. Hingga saat ini program Bina Keluarga TKI belum dikenal secara luas di masyarakat daerah tersebut. Salah satu desa percontohan berada di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir. Kelompok Kerja BKTKI Sempulur telah berdiri sekitar 2 tahun tetapi belum ada yang melihat secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan program dan efektivitas program tersebut berjalan selama ini.

Penerapan program Bina Keluarga TKI berdasarkan panduan umum Bina Keluarga TKI dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, strategi pengembangan, pemantauan dan evaluasi program. Keberhasilan suatu program juga merupakan salah satu alat ukur dalam menilai efektivitas program. Dengan adanya tahapan kegiatan tersebut kemungkinan tujuan dari suatu program dapat terlaksana dengan baik. Untuk melihat keefektivan pelaksanaan program Bina Keluarga TKI dapat dilihat dengan empat variabel yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Variabel tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan sasaran penerima program, apakah dengan terlaksananya program memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan penerima program atau justru malah tidak pengaruh yang dirasakan oleh penerima program.⁴

⁴ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 2017, *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*, Online: http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_DataP2TKI_tahun_2016.pdf

Salah satu bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak di bidang pangan. UKM tersebut adalah UKM yang bergerak di bidang pengolahan dan pendistribusian makanan dan minuman. “BKTKI SEMPULUR” salah satu bentuk UMKM makanan ringan seperti stik Talas, kerupuk gadung, dan aneka keripik lainnya, untuk ,minumannya seperti Sinom, Sinom adalah minuman tradisional khas Jawa, Minuman lezat ini dibuat dari campuran air, asam Jawa, daun asam muda alias sinom, gula asli dan juga kunyit di kembangkan pada UMKM di Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dalam usahanya BKTKI SEMPULUR melakukan produksi aneka makanan ringan dan juga minuman (sinom) yang kemudian dikemas dan di berikan label serta harga, guna menggapai pasar yang luas dan tidak terbatas. Dalam menjalankan usahanya BKTKI SEMPULUR baru mampu memasarkan produknya masih di wilayah Tulungagung saja. Atau dapat dikatakan produk BKTKI SEMPULUR baru menguasai pasar daerah Tulungagung saja, dan belum mampu memasarkan di daerah luar kota Tulungagung. Namun juga sering ikut memasarkan produknya pada acara Bazar.

B. Fokus Penelitian

1. Apa upaya yang dilakukan TKI dan TKI PURNA Bagi kesejahteraan di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ini ?

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan program TKI dan TKI PURNA pada Kelompok Kerja BKTKI Sempulur Desa Pagersari Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya TKI dan TKI purna dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Pagersari
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas program TKI dan TKI PURNA pada Kelompok Kerja BKTKI Sempulur Desa Pagersari Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi TKI di Tulungagung

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan mengenai TKI yang bekerja dileluar negeri agar lebih maju dalam membuat usaha nantinya.

b. Bagi UMKM

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah pengetahuan dan wawasan serta keilmuan bagi anggota UMKM yang sedang menambah wawasan tentang usaha UMKM nya, terutama para TKI dan TKI PURNA yang berperan dalam UMKM Di Desa Pagersari. Sehingga TKI dan pelaku UMKM dapat saling berkontribusi baik dengan anggota UMKM, serta dapat mengubah konsep pemasaran atau promosi yang lebih baik dalam mempromosikan produknya.

c. Bagi Peneliti

penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan juga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat membuka cakrawala berfikir untuk memunculkan bidang penelitian yang sama dengan lebih menggali potensi penelitian yang belum mampu digali dalam penelitian ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan dan menambah wacana keilmuan komunikasi dan menambah wawasan

tentang penelitian yang berkaitan dengan Peran TKI dan TKI PURNA dalam UMKM di BKTKI SEMPULUR.

3. Manfaat akademik

Memberikan bahan pembelajaran dan referensi dalam pengembangan lembaga terutama dalam hal analisis efektivitas program Bina Keluarga TKI melalui empat variabel efektivitas program.

4. Manfaat praktik

Sebagai bahan pendukung bagi UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kalidawir, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung dan masukan untuk program Bina Keluarga TKI pada daerah/desa lain.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang yang memiliki status-status sosial khusus. Menurut Merton setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam-macam status dan masing-masing status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan role-set atau perangkat peran. Sedangkan status yang banyak itu dinamakannya perangkat-perangkat peran atau status-set.⁵

b. Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI)

⁵ Janu Murdiamoko, *Ibid.*, hal. 40

TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timor Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima Upah. Namun istilah TKI sering kali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran.⁶

c. TKI Purna

TKI Purna adalah tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke daerah asalnya dari negara tempat ia bekerja, baik dikarenakan kontrak kerja yang sudah habis maupun TKI yang pulang karena bermasalah. Dengan selesainya kontrak penempatan kerja, para TKI akan kembali ke daerah asalnya masing-masing dan dapat dikatakan akan menjalani kehidupan/rutinitas yang berbeda dibandingkan pada saat pengalaman penempatan di luar negeri. Tidak jarang didapati TKI Purna yang hilang pandangan, akan seperti apa perekonomiannya nanti selepas penempatan. Menurut penelitian yang dilakukan Pratomo dan Jayanthakumaran (2018), sekembalinya pekerja migran (TKI Purna) ke negaranya dengan sejumlah remitan tidak akan membuat perekonomian mereka bertahan dalam jangka waktu yang lama karena modal berupa remitan tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumsi.

⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Indeks Statistik TKI 2020*, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-peempatan-dan-perindungan-tkiperiodeSeptember-tahun-2020> diakses pada 5 November 2020

Jika para TKI Purna hanya melakukan kegiatan konsumsi saja maka siklus kemiskinan akan terus berlanjut, dengan kata lain pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.⁷

d. UMKM

UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah). dan untuk usaha menengah paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.⁸

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang.

Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp

⁷ Lee, Everett S. 1966. A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, No. 1, hal. 47-57. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2060063>

⁸ Mukti Fajar, UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hal. 45

50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jikapertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, makasasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan pelaporan dan pembahasan peneliti membuat dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan djelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari teori yang membahas variabel pertama, teori yang membahas variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

⁹ Iskandar Putong, “*Pengantar Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2008)

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pemaparan data, dan temuan penelitian dan analisis data yang di kumpulkan oleh peneliti dengan prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan.

BAB V: PEMBAHASAN

Menjelaskan analisis antara teori dan temuan penelitian. Memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intrepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*Grounded Theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam Khazanah kajian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang membuat dan menganalisis kesimpulan pada penelitian ini setelah mengkaji data mendapatkan hasil dari penelitian ,dan membuat saran yang membangun dari berbagai pihak.